

## **LAPORAN**

# **PELAKSANAAN TATA KELOLA**

## **PT BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL (PERSERODA)**

### **TAHUN 2023**



## **PT BPR**

## **BANK DAERAH GUNUNGKIDUL (PERSERODA)**

### **Kantor Pusat**

Jl. Brigjen Katamso No 49, Wonosari Gunungkidul  
Telp : (0274) 391270, 394390, Fax. (0274) 391270  
Email : [info@bankgunungkidul.co.id](mailto:info@bankgunungkidul.co.id)  
Website : [www.bankgunungkidul.co.id](http://www.bankgunungkidul.co.id)

### **2024**

## BAB I

### PENJELASAN UMUM

#### A. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, maka PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) menyusun dan melaporkan hasil dari Pelaksanaan Tata Kelola yang telah diterapkan periode tahun 2023. Laporan ini selain disusun untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang saham dan Otoritas Jasa Keuangan, dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara jelas tentang kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) menyadari betapa pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dalam mempertahankan kepercayaan dan memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan serta berkomitmen untuk mendukung dan mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam proses implementasi tersebut diatas, berbagai perbaikan dan penyempurnaan telah dilakukan. Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* saat ini merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan suatu perusahaan dan memastikan pelaksanaan kegiatan bisnis dan pengelolaan aset perusahaan dilakukan secara sehat, penuh kehati-hatian, patuh terhadap ketentuan, efektif, efisien serta sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

#### B. Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR merupakan Bank yang dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit.

BPR sebagai fungsi perantara antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola - *Good Corporate Governance (GCG)* dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa

keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan *Good Corporate Governance* (GCG).

Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BPR menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan nilai perusahaan (*corporate value*) dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

### **C. Fungsi Pedoman Kebijakan & GCG**

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) bagi PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda), sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR, melindungi Stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR, memberikan batasan-batasan dalam operasional agar tidak melanggar terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, menjadi kontrol dalam setiap operasional Bank.

### **D. Dasar Hukum Kebijakan GCG**

Dasar penyusunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) adalah :

#### 1. Undang-undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

#### 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

#### 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016, Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020, Tentang Perubahan Atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015, Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019, Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
5. Anggaran Dasar PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda).
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda).

## **E. Prinsip-Prinsip GCG**

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya BPR wajib senantiasa menganut prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai berikut :

### **1. Transparansi (*Transparency*)**

Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Transparansi harus mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan

masyarakat. Transparansi diperlukan agar bank menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan nasabah.

Transparansi dalam operasional di PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) adalah sebagai berikut :

- a. Keterbukaan dalam penyampaian laporan keuangan kepada pihak esktern dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Kemudahan mengakses laporan-laporan

## **2. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi Bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.

Akuntabilitas harus mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. BPR sebagai Lembaga Kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada stakeholder. Untuk itu BPR harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan BPR merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja BPR yang berkesinambungan.

## **3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Merupakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip - prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Responsibilitas harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Bank serta tanggungjawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

## **4. Independensi (*Independency*)**

Merupakan pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka BPR harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar masing-masing bagian perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak

manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

#### **5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran dan kesetaraan harus mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dalam melaksanakan kegiatannya, BPR harus senantiasa memperhatikan kepentingan kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Dra. RINI WIDIYANTI
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membawahkan Direktur Bisnis dan Direktur Kepatuhan dan Umum,</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pemantauan langsung kinerja Bagian Satuan Kerja Audit Intern.</li><li>3. Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin BPR.</li><li>4. Membina serta melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab bagian-bagian dalam struktur organisasi BPR berdasarkan asas ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan serta ketentuan yang berlaku.</li><li>5. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar anggota Direksi.</li><li>6. Memimpin dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan kinerja BPR.</li><li>7. Memantau perkembangan kinerja BPR.</li><li>8. Melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan dengan pihak ketiga dengan prinsip kehati-hatian serta menguntungkan bagi perusahaan.</li><li>9. Menetapkan kebijakan sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.</li><li>10. Menjaga dan meningkatkan kinerja BPR</li><li>11. Melakukan koordinasi dengan anggota Direksi terhadap kebijakan-kebijakan kegiatan seluruh operasional Bank, untuk meningkatkan kinerja perusahaan</li></ol>		
2.	Nama	:	Suci Sulistyawati, S.H.
	Jabatan	:	Direktur Bisnis
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membawahkan Bagian bisnis.</li><li>2. Mewakili Direktur Utama apabila berhalangan hadir.</li><li>3. Bersama Direktur Utama menetapkan kebijakan perusahaan yang sesuai dengan wewenangnya.</li><li>4. Bersama jajaran Direksi melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan penyusunan Rencana Bisnis Bank.</li><li>5. Melakukan penyusunan rencana target operasional penyaluran dan penghimpunan dana.</li></ol>		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Melakukan penyusunan rencana strategi pemasaran produk bank.</li> <li>7. Meneliti kebenaran dan kesempurnaan prosedur penyaluran dan penyimpanan dana.</li> <li>8. Bertanggungjawab atas pengaduan, penanganan, dan penyelesaian keluhan/pengaduan nasabah</li> <li>9. Melakukan penyusunan strategi dalam kegiatan penyelesaian kredit.</li> <li>10. Melaksanakan tugas- tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.</li> </ol>									
3.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Nama</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td>Yustika Ari Sukapti. S.E.</td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td>:</td> <td>Direktur Kepatuhan dan Umum</td> </tr> <tr> <td>Tugas dan Tanggung Jawab</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawahkan Satuan Kerja Manajemen risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, APU PPT, Bagian Umum dan keuangan, SDM dan IT.</li> <li>2. Mewakili Direktur Utama apabila berhalangan hadir.</li> <li>3. Meminimalkan risiko kepatuhan terhadap jalannya kegiatan operasional Bank.</li> <li>4. Bersama jajaran Direksi merumuskan strategi dan langkah- langkah dalam Rencana Bisnis Bank.</li> <li>5. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati- hatian.</li> <li>6. Memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lainnya.</li> <li>7. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang- undangan lain yang relevan.</li> <li>8. Melakukan koordinasi dan kesempurnaan tentang kekuatan yudridis akta perjanjian para pihak-pihak.</li> <li>9. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi.</li> <li>10. Memantau dan menjaga serta menetapkan langkah- langkah penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.</li> <li>11. Melakukan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan bagian yang dibawahinya.</li> <li>12. Meneliti kebenaran dan kesempurnaan bagian pembukuan dan IT.</li> </ol>	Nama	:	Yustika Ari Sukapti. S.E.	Jabatan	:	Direktur Kepatuhan dan Umum	Tugas dan Tanggung Jawab	:	
Nama	:	Yustika Ari Sukapti. S.E.								
Jabatan	:	Direktur Kepatuhan dan Umum								
Tugas dan Tanggung Jawab	:									
<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris</b>										
<p>Sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris agar Direksi kedepan dapat mempertahankan hasil kinerja perusahaan dan untuk pos yang belum tercapai agar dilakukan evaluasi, dan permasalahan NPL agar menjadi perhatian serta agar dilakukan perbaikan kualitas kredit untuk kedepannya, dan selalu melakukan pemantauan terhadap relaksasi kredit secara rutin terutama pada kredit besar, untuk dilakukan perbaikan kualitas kredit di tahun 2024 dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, untuk sektor dana untuk meningkatkan produk tabungan maupun deposito, juga berkomitmen untuk tindak lanjut atas temuan audit, rencana perkembangan SDM untuk disesuaikan dengan POJK nomor 19 tahun</p>										



2023, serta pengembangan IT agar dioptimalkan, mengoptimalkan efisiensi biaya non operasional pada tahun 2024

## 2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	SUPRIYADI, S.TP
	Jabatan	:	Komisaris Utama Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.</li> <li>Wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategis perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat pada Direksi.</li> <li>Wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>Wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern Perusahaan, Auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau Otoritas lainnya.</li> <li>Wajib mereview visi dan misi perusahaan pada awal setiap memangku jabatan setelah pengangkatannya.</li> <li>Wajib melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya.</li> <li>Wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris perusahaan, serta perundang- undangan yang berlaku.</li> </ol>		
2.	Nama	:	FAHMY AKBAR IDRIES, S.E., M.M.
	Jabatan	:	Komisaris Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wajib memastikan komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.</li> <li>Dapat meminta Direksi dan Anggota Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perusahaan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.</li> </ol>		
3.	Nama	:	KELIK YUNANTORO, S. Sos., M.M
	Jabatan	:	Komisaris Unsur Pejabat pemerintah
	Tugas dan Tanggung Jawab :		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>2. Wajib memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern Perusahaan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa keuangan dan/atau Otoritas lainnya.</li> <li>3. Wajib memastikan bahwa komite- komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.</li> <li>4. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.</li> <li>5. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.</li> <li>6. Wajib menjalankan pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.</li> <li>7. Wajib mereview visi dan misi perusahaan di setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya.</li> </ol>
--	--

**Rekomendasi Kepada Direksi**

Memberikan rekomendasi kepada Direksi agar kedepan dapat mempertahankan hasil kinerja perusahaan dan untuk pos yang belum tercapai agar dilakukan evaluasi, dan permasalahan NPL agar menjadi perhatian serta agar dilakukan perbaikan kualitas kredit untuk kedepannya, dan selalu melakukan pemantauan terhadap relaksasi kredit secara rutin terutama pada kredit besar, untuk dilakukan perbaikan kualitas kredit di tahun 2024 dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, untuk sektor dana untuk meningkatkan produk tabungan maupun deposito, juga berkomitmen untuk tindak lanjut atas temuan audit, rencana perkembangan SDM untuk disesuaikan dengan POJK nomor 19 tahun 2023, serta pengembangan IT agar dioptimalkan, efisiensi biaya non operasional pada tahun 2024 agar dioptimalkan

**3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite**

**a. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite**

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	<p>Komite Audit</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.</li> <li>b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank.</li> <li>c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan jasa yang diberikannya.</li> <li>d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.</li> <li>f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi jika Bank tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.</li> <li>g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.</li> <li>h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.</li> <li>i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank. Mendokumentasikan hasil kerja maupun kegiatannya sebagai arsip hasil output dari komite.</li> </ul>
2.	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.</li> <li>b. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.</li> <li>c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen risiko.</li> <li>d. Mendokumentasikan hasil komite sebagai arsip dan output dari Rapat Komite.</li> </ul>
3.	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi, kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.</li> <li>b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.</li> <li>c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.</li> <li>d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. sedangkan terkait dengan fungsi Remunerasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai ; Struktur Remunerasi, Kebijakan Remunrasi dan Besaran atas remunerasi.</li> <li>e. Mendokumentasikan hasil kerja maupun kegiatannya sebagai arsip hasil output dari komite.</li> </ul>

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.	SUPRIYADI, S.TP	a. Komisaris Utama Independen	Ketua		Ketua	Ya
2.	FAHMY AKBAR IDRIES, S.E., M.M.	b. Komisaris Independen		Ketua	Anggota	Ya
3.	AHMAD MA'RUF, SE, M.Si	<p>a. Sudah mengikuti Sertifikasi Kompetensi Manajemen risiko Perbankan (level1).</p> <p>b. Sudah mengikuti Sertifikasi Kompetensi Bank Perkreditan Rakyat bidang Komisaris (Sertifikat VI).</p> <p>c. Dosen Ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.</p> <p>d. Peneliti utama Institute of Public Policy and Economic Studies (INSPECT).</p> <p>e. Tenaga ahli Bidang Perekonomian Bappeda DIY.</p>	Anggota	Anggota		

4.	MUHAMMAD FIKRON WASHLY, SE	a. Pendidikan Magister Sains Ekonomi UGM.  b. Sebagai peneliti di bidang perekonomian, sampai saat ini sudah melakukan penelitian sebanyak 51 penelitian.	Anggota	Anggota		Ya
5.	LISTYO WIENDRIANTO , SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan			Anggota	Tidak
6.	PANJI NGADIO, S.Kom.	Kepala Bagian SDM, sehingga fungsinya sesuai dengan komite remunerasi			Anggota	Tidak

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	<p>Komite Audit</p> <p>Program Kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.</li> <li>Menelaah pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan audit internal.</li> <li>Menyusun Rekomendasi Penunjukan Akuntan.</li> <li>Menelaah atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BPR.</li> <li>Menelaah Pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BPR.</li> <li>Menghadiri rapat Komisaris untuk melaporkan hasil kinerja.</li> </ol> <p>Realisasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Telaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.</li> <li>Telaah pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan audit internal.</li> <li>Menyusun rekomendasi penunjukan Akuntan.</li> <li>Telaah atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BPR.</li> <li>Telaah pengaduan berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BPR.</li> </ol>

	<p>f. Menghadiri Rapat komisaris untuk melaporkan hasil kinerja.</p>
	<p>Jumlah Rapat : 7 kali</p>
2.	<p><b>Komite Pemantau Risiko</b></p>
	<p>Program Kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membantu komisaris dalam bidang pengawasan terhadap pejabat eksekutif.</li> <li>Review laporan secara berkala dan upaya peningkatan mitigasi risiko yang dilakukan oleh bagian Manajemen risiko.</li> <li>Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen risiko.</li> <li>Menindaklanjuti hasil Pemeriksaan OJK dan memastikan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK.</li> <li>Melakukan Rapat minimal selama 3 Bulan Sekali.</li> </ol>
	<p>Realisasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Telaah atas pelaksanaan Manajemen risiko pada Bank dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.</li> <li>Telaah pelaksanaan Tindak lanjut Direksi atas temuan dan rekomendasi berkaitan mamajemen risiko baik dari eksternal (OJK) maupun Internal (Satuan Manajemen Risiko Kepatuhan).</li> <li>Menyusun rekomendasi pelaksanaan manajemen risiko pada Bank.</li> <li>Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan dan Satuan Manajemen Risiko.</li> <li>Menghadiri rapat komisaris untuk melaporkan hasilnya.</li> <li>Kegiatan lain yang diperlukan.</li> </ol>
	<p>Jumlah Rapat : 6 kali</p>
2.	<p><b>Komite Remunerasi dan Nominasi</b></p>
	<p>Program Kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan skala poin gaji pegawai sesuai tugas dan risiko sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 3 ayat 1</li> <li>Penyesuaian Struktur organisasi dan rotasi pegawai</li> <li>Penyesuaian batas usia pegawai untuk jabatan tertentu</li> </ol>
	<p>Realisasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi terhadap perhitungan point gaji pegawai dengan memperhitungkan faktor tanggung jawab dan risiko pekerjaan dengan melakukan pengkinian SK Direksi terkait penetapan skala gaji pegawai</li> <li>Evaluasi struktur organisasi dengan menyesuaikan kondisi terkini, serta</li> </ol>

	<p>dilakukan penyegaran SDM dengan melakukan rotasi untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya fraud.</p> <p>c. Evaluasi terhadap pembatasan usia pegawai untuk posisi jabatan tertentu dalam perusahaan berdasar potensi risiko dalam pekerjaan</p>
	Jumlah Rapat : 4

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dra. RINI WIDIYANTI	Rp. 0,00,-	0 %
2.	SUCI SULISTYAWATI, S.H.	Rp. 0,00,-	0%
3.	YUSTIKA ARI SUKAPTI, S.E.	Rp. 0,00,-	0%

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dra. RINI WIDIYANTI	-	0 %
2.	SUCI SULISTYAWATI, S.H.	-	0%
3.	YUSTIKA ARI SUKAPTI, S.E.	-	0%

## C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Dra. RINI WIDIYANTI	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	SUCI SULISTYAWATI, S.H.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	YUSTIKA ARI SUKAPTI, S.E.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Dra. RINI WIDIYANTI	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	SUCI SULISTYAWATI, S.H.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	YUSTIKA ARI SUKAPTI, S.E.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	SUPRIYADI, S.TP	Rp. 0,00,-	0 %
2.	FAHMY AKBAR IDRIES, S.E., M.M.	Rp. 0,00,-	0%
3.	KELIK YUNIANTORO, S. Sos., M.M	Rp. 0,00,-	0%

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	SUPRIYADI, S.TP	-	0 %
2.	FAHMY AKBAR IDRIES, S.E., M.M.	-	0%
3.	KELIK YUNIANTORO, S. Sos., M.M	-	0%

## E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham



1.	SUPRIYADI, S.TP	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	FAHMY AKBAR IDRIES, S.E., M.M.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	KELIK YUNiantoro, S. Sos., M.M	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	SUPRIYADI, S.TP	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	FAHMY AKBAR IDRIES, S.E., M.M.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	KELIK YUNiantoro, S. Sos., M.M	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

## F. Paket/Kebijakan remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp 2.163.902.078	3	Rp 468.000.000
2.	Tunjangan	3	Rp 1.547.214.580		
3.	Tantiem	3	Rp 1.668.662.446	3	Rp 172.002.549
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00
	<b>Total</b>		<b>Rp 5.379.779.104</b>		<b>Rp 640.002.549</b>

**2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Rumah (3)	Tidak Ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas (3)	Tidak Ada
3.	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan (3)	Tidak Ada
4.	Fasilitas Lainnya	Fasilitas Telepon (3)	Tidak Ada

**G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah**

Keterangan	Perbandingan (a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	8.77 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.38 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	4.30 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4.42 : 1

**H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

**1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris**

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	4 Januari 2023	2	Pengkinian aturan dan kebijakan intern SPO Bisnis serta penilaian kinerja karyawan
2.	5 Januari 2023	2	Evaluasi kinerja BPR
3.	4 April 2023	2	Evaluasi RBB triwulan I 2023
4.	3 Juli 2023	3	Evaluasi RBB triwulan II 2023
5.	20 Oktober 2023	3	Evaluasi RBB posisi September 2023 dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

			OJK
6.	27 November 2023	3	Pembahasan RBB 2024
<p>Penjelasan lebih lanjut pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun :</p> <p>Komisaris dari unsur pemerintah daerah diangkat pada tanggal 11 April 2023, sehingga menyebabkan jumlah kehadiran pada rapat tidak sama.</p> <p>Rapat yang tercatat ini merupakan rapat yang teragenda. Namun diluar jadwal rapat ini Dewan Komisaris melakukan koordinasi rutin dengan Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.</p>			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	SUPRIYADI, S.TP	6		100.00
2.	FAHMY AKBAR IDRIES, S.E., M.M.	6		100.00
3.	KELIK YUNANTORO, S. Sos., M.M	3		50.00

### I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui		0		0		0		0

Proses Hukum						
Penjelasan Lebih Lanjut :						
Tidak ada penyimpangan internal ( internal Fraud) dalam BPR						

#### J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan lebih lanjut :		
Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR semua dapat diselesaikan secara kekeluargaan		

#### K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	-	-	-	-	-	0	-
2.	-	-	-	-	-	0	-
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tidak ada benturan kepentingan dalam BPR							

#### L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial/Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	21/01/2023	Sosial	Bantuan rumah tidak layak huni (RTLH)	Masyarakat pucung kemadang tanjungsari	15,000,000

2.	05/03/2023	Sosial	Bantuan bedah rumah	Warga candi gedangsari	15,000,000
3.	10/03/2023	Sosial	Bantuan fasilitas umum pantai kukup	Warga pantai kukup	7,000,000
4.	17/03/2023	Sosial	Bantuan bencana kebakaran rumah	Warga pijenan tambakromo ponjong	3,000,000
5.	17/03/2023	Sosial	Bantuan fasilitas umum taman kuliner wonosari (meja dan kursi)	Pedagang pasar kuliner wonosari	1,350,000
6.	17/03/2023	Sosial	Bantuan sembako untuk pasar murah Dinas Perdagangan Gunungkidul	Masyarakat gunungkidul	2,000,000
7.	29/03/2023	Sosial	Bantuan untuk karang taruna garda puri purbosari	Karangtaruna gardapuri purbosari wonosari	15,350,000
8.	30/03/2023	Sosial	Bantuan bencana kebakaran rumah	Warga gedangsari	4,000,000
9.	18/04/2023	Sosial	Bantuan tenda untuk pengamanan lebaran	Dinas pariwisata gunuungkidul	6,900,000
10.	11/05/2023	Sosial	Bantuan pembuatan dan pemasangan patung	Warga kalurahan kedungkeris nglipar	10,000,000
11.	11/05/2023	Sosial	Bantuan disverifikasi produk lokal daun kelor dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting (BRIN)	Kalurahan kelor karangmojo	15,105420
12.	16/05/2023	Sosial	Bantuan pembuatan instalasi listrik dan jaringan pipa	Warga jurangjero ngawen	2,500,000
13.	24/05/2023	Sosial	Bantuan paket sembako untuk penanganan anak stunting dan gizi buruk	Warga kalurahan planjan saptosari	5,000,000
14.	07/06/2023	Sosial	Bantuan perbaikan jalan dusun sumberjo	Warga dusun sumberjo nglipar	1,500,000

			nglipar		
15.	10/06/2023	Sosial	Bantuan perbaikan rumah warga tak layak huni	Warga tambaran lor kalitekuk semin	3,000,000
16.	17/06/2023	Sosial	Bantuan sembako dalam rangka HUT Bhayangkara ke 77	Warga serpeng semanu	4,500,000
17.	19/06/2023	Sosial	Bantuan pembangunan sarana dan prasarana pondok pesantren Bani Sugeng Al-Qodri	Pondon pesantren Bani Sugeng Al-Qodri, kemejing semin	5,000,000
18	04/07/2023	Sosial	Bantuan pembuatan sumur bor kelompok tani utomo	Kelompok tani utomo, ngleri playen	18,600,000
19	04/07/2023	Sosial	Bantuan pembuatan sumur bor kelompok tani ngudi lestari	kelompok tani ngudi lestari, ngleri playen	2,000,000
20	01/09/2023	Sosial	Bantuan tampungan air 5000 liter masjid Amalussajidin	Masjid Amalussajidin, gedangsari	7,250,000
21	12/09/2023	Sosial	Bantuan sarana air bersih dan sumur bor	Warga Lapas II B wonosari	3,864,000
22	22/09/2023	Sosial	Bantuan droping air dalam rangka Dies Natalis Univ Gunungkidul	Warga Gunungkidul	1,000,000
23	26/09/2023	Sosial	Bantuan tempat sampah dan komposer Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul	Masyarakat Gunungkidul	4,250,000
24	05/10/2023	Sosial	Bantuan sarana dan prasarana pedagang taman kuliner	Pedagang taman kuliner wonosari	2,641,926
25	12/10/2023	Sosial	Bantuan perbaikan jembatan	Warga bejiharjo karangmojo	5,000,000
26	12/10/2023	Sosial	Bantuan pembuatan tiang lampu	Warga	2,000,000

			penerangan	bendung semin	
27	24/10/2023	Sosial	Bantuan pembuatan tiang lampu penerangan	Warga bulurejo semin	2,000,000
28	21/11/2023	Sosial	Bantuan sarana dan prasarana taman anak nursaba	Warga desa semoyo patuk	2,000,000
29	20/11/2023	Sosial	Bantuan pembuatan sumur bor	Warga desa semoyo patuk	5,000,000
30	21/11/2023	Sosial	bantuan penerangan goa senen	Warga purwodadi tepus	8,000,000
31	06/12/2023	Sosial	Bantuan tenda dan kursi karang taruna sinar remaja	Karang taruna desa pocung girisubo	10,000,000
32	06/12/2023	Sosial	Bantuan kursi balai pedukuhan	Warga padukuhan kerdon wiladeg karangmojo	3,750,000
33	06/12/2023	Sosial	Bantuan alat pertanian kelompok tani sido rukun	Kelompok tani sido rukun jeruksari wonosari	15,000,000
34	06/12/2023	Sosial	Bantuan rehab kursi padukuhan wonosobo II	Warga padukuhan wonosobo II banjarejo tanjungsari	7,000,000
35	06/12/2023	Sosial	Bantuan pengadaan kursi plastik	Warga wareng kepek saptosari	7,000,000

### BAB III

#### HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Pasal 77 yaitu BPR wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola BPR dengan ruang lingkup sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan.

##### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT BPR BANK DAERAH GUNUNGGKIDUL (PERSERODA)

Alamat : Jl. Brigjend Katamso 49 Wonosari Gunungkidul

Nomor Telepon : (0274) 391270

Posisi Laporan : Desember 2023

Modal Inti : Rp. **132,258,983,180,-**

Total Aset : Rp. **620,720,885,505,-**

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan Penerapan Tata Kelola (GCG) PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) Desember 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai Komposit Penerapan Tata Kelola (GCG) sebesar 2 (dua) dengan predikat baik
2. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

No	Faktor yang Dinilai	Nilai (S+P+H)	Nilai (Dibobot)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1.63	0.326
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1.72	0.215
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	2.10	0.053
4.	Penanganan benturan kepentingan	2.90	0.290
5.	Penerapan fungsi kepatuhan	2.21	1.221



6.	Penerapan fungsi audit intern	2.48	0.248
7.	Penerapan fungsi audit ekstern	1.70	0.043
8.	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	2.23	0.223
9.	Batas maksimum pemberian kredit	1.40	0.105
10.	Rencana bisnis	1.90	0.143
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan intenal	1.70	0.128
Nilai Komposit			1.995
Peringkat Komposit		2	
Predikat Komposit		Baik	

## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 :

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan.

### 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan.

### 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite sudah memenuhi diantaranya komite audit komite pemantau risiko dan Komite Remunerasi dan nominasi.

### 4. Penanganan benturan kepentingan

Benturan kepentingan selama ini tidak pernah terjadi di BPR.

### 5. Penerapan fungsi kepatuhan

Penerapan fungsi kepatuhan sudah berjalan sebagaimana mestinya dan sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

## **6. Penerapan fungsi audit intern**

Penerapan fungsi audit sudah berjalan sebagaimana mestinya.

## **7. Penerapan fungsi audit ekstern**

Penerapan audit ekstern selama ini sudah dilakukan oleh KAP.

## **8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern**

Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendali intern telah diefektifkan.

## **9. Batas maksimum pemberian kredit**

BMPK diatur dan diterapkan sesuai dengan ketentuan BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

## **10. Rencana bisnis**

Rencana bisnis sudah disusun sesuai dengan ketentuan dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

## **11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan intenal**

Kondisi keuangan dan non keuangan telah dilaporkan secara transparan.

### **C. Kesimpulan Umum**

Dalam penerapan Tata Kelola PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) tahun 2023, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara penerapan struktur dan infrastruktur. Dimana hasilnya sudah cukup memadai dalam menunjang serangkaian proses penerapan Tata Kelola. Masing-masing faktor pada Penilaian Sendiri ( Self Assesment) Tata Kelola PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aspek struktur pada penerapan Tata Kelola, pada seluruh faktor atau indikator telah dilakukan pemenuhan baik terhadap fungsi yang ada maupun kebijakan yang telah disusun dan dikinikan. Bank juga telah berupaya melaksanakan penerapan manajemen resiko yang dilihat dari modal inti dan asset yang dimiliki. Namun saat ini BPR harus berkonsentrasi dalam upayanya untuk dapat menyelesaikan kredit bermasalah yang setiap bulan mengalami kenaikan. Penyusunan strategi bisnis yang sesuai dengan kebutuhan bisnis BPR. Dalam setiap kegiatan operasional tetap melakukan pengukuran terhadap seluruh jenis resiko untuk meminimalkan timbulnya resiko serta berupaya untuk melakukan inovasi strategi untuk pencapaian RBB

2. Peran serta seluruh stakeholder dalam mematuhi dan melaksanakan setiap kegiatan telah berpedoman pada prosedur, kebijakan dan peraturan internal dan perundang-undangan lainnya. Bank telah berupaya melakukan pemenuhan struktur, pengkinian kebijakan BPR dan penyesuaian beberapa fungsi dalam operasional bank. Hal ini berperan penting sehingga mampu bersinergi dengan fungsi lain yang ada sehingga ke depannya pelaksanaan Tata Kelola ini dapat berjalan dengan maksimal.
3. Kurang optimalnya pelaksanaan penerapan tata kelola di beberapa hal akan menjadi evaluasi dan perbaikan ke depan. Sehingga diharapkan penerapan tata kelola dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi target yang direncanakan.

## **PENUTUP**

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola *Good Corporate Governance* (GCG) BPR ini disampaikan, dan kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang telah memberikan kepercayaan serta dukungannya bagi kemajuan dan perkembangan PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda).

Wonosari, 22 Januari 2024

PT BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL (PERSERODA)

Menyetujui

Dra. RINI WIDIYANTI  
Direktur Utama

SUPRIYADI, STP  
Komisaris Utama